

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial, artinya makhluk yang tidak bisa hidup sendiri-sendiri, makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain karena pada dasarnya manusia merupakan satu komponen yang saling ketergantungan. Individu barulah dapat dikatakan individu apabila pola perilakunya yang khas pada dirinya di proyeksikan pada suatu lingkungan, yaitu masyarakat. Selain dari itu manusia juga berhubungan dengan lingkungannya di dorong oleh kebutuhan sehingga keberlangsungan hidupnya bisa terpenuhi.

Manusia pun menurut Ibnu Khaldun tidak bisa berdiri sendiri. Ini terlihat dari kenyataan bahwa manusia tidak terlepas dari pertolongan dan bantuan dari orang lain terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok dan pertahanan diri.<sup>1</sup> Dengan demikian sudah menjadi fitrah manusia hidup dan mati sebagai anggota masyarakat, mereka bergaul, berinteraksi, bekerja sama dan mempunyai norma-norma yang merupakan kebutuhan bersama.

Pada dasarnya manusia berhubungan dengan yang lainnya atas kepentingan semata, entah itu dalam pemenuhan kebutuhan maupun pertahanan diri. Hubungan-hubungan yang terjadi membentuk pada setiap manusia membentuk sebuah kelompok. Karena pada dasarnya kelompok merupakan sebuah kumpulan orang yang mempunyai kesadaran bersama atas kepentingannya dan memiliki pola interaksi yang terorganisir.<sup>2</sup>

Cooley membagi kelompok menjadi dua, kelompok primer (*Primary Group*) dan Kelompok Sekunder (*Secondary Groups*). Pembagian ini di turunkan dari gagasan bahwa

---

<sup>1</sup> Ali Audah, 1999, *Dari Khasanah Dunia Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999, hal.92

<sup>2</sup> Paul B Horton, 1984, *Sosiologi*, Jakarta: Erlangga, hal. 214-215

kemajuan manusia meliputi ekspansi meluas yang abadi dari simpati manusia, dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar.<sup>3</sup> Pada dasarnya kelompok primer berdasarkan hubungan emosional, personal, informal dan mencakup banyak aspek dari berbagai kehidupan sehingga kelompok ini jauh pada kecenderunagn individualistik, berbeda halnya dengan kelompok sekunder yang didasarkan atas asas kemanfaatan (*Utilitarian*), formal dan impersonal alhasil interaksi yang terjadi hanya berlangsung atas kemanfaatan semata akan tetapi kelompok ini pada tingkat struktur organisasi mempunyai kemampuan tersendiri.<sup>4</sup>

Khususnya pada kelompok sekunder, kelompok ini berorientasi pada keuntungan dan tujuan. Kelompok ini mendasarkan hubungan antar anggota sosialnya pada penyelesaian pekerjaan.<sup>5</sup> Seseorang tidak berurusan dengan orang lain sebagai suatu pribadi, sebagai orang yang berfungsi menjalankan suatu peran. Kualitas pribaditidak di anggap penting, yang penting hanyalah cara kerja.<sup>6</sup>

Sebagai seorang Fungsional Struktural, Parson membedakan empat subsitem dalam sebuah kelompok. Pertama *Adaptation* (adaptasi), merupakan sebuah sistem yang harus menyesuaikan dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya, *Goal Attainment* (Pencapaian Tujuan), sebuah sistem harus mendefinisikan perannya dan mencapai tujuan utamanya, *Integration* (Integrasi) sebuah sistem harus mengatur hubungan antar bagian, sehingga selalu berjalan harmonis dan yang terakhir adalah *Latency* (Pemeliharaan), sebuah sistem harus mampu memelihara, memperbaiki dan melengkapi sehingga sebuah kelompok terus terjaga.

---

<sup>3</sup> Rahmat K. Dwi Susilo, 2009, *20 Tokoh Sosiologi Modern* Jakarta: Ar-Ruzz Media, hal. 83

<sup>4</sup> Paul B. Horton, *Op.Cit*, hal. 225

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 226

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 225

Dalam kelompok sekunder, sebuah *Goal Attainment* (Pencapaian Tujuan merupakan hal yang paling penting karena pada dasarnya kelompok ini terbentuk atas dasar kesamaan kepentingan. Bagi Parson *Goal Attainment* (Pencapaian Tujuan) di bangun atas asumsi pembagian kerja, pembagian peran sehingga mampu memobilisasi sumber daya yang ada untuk mencapai tujuannya.<sup>7</sup>

Serikat buruh, Bagi Selisidney dan Beatrice webb, pada dasarnya di dasarkan kondisi kerja dan ekonomi; upah, jam kerja, kesehatan, jaminan sosial dan kesejahteraan. Selain itu buruh juga menyadari posisinya sebagai kelas yang di bawah kekuasaan majikan, sehingga rentan untuk di perlakukan semena-mena oleh majikan (pemilih modal).<sup>8</sup>

Bila berkaca pada masa lalu, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) pada awal-awal tahun 80-90 merupakan serikat pekerja yang satu-satunya di akui oleh pemerintah, ini pun tak lepas dari sikap otoriter masa orde baru bahkan rezim militer pada masa itu mampu mengintervensi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI).<sup>9</sup> Alih-alih serikat pekerja berdiri, pada dasarnya hanya kamufase belaka untuk memanipulasi gerakan pekerja agar bisa di kendalikan oleh pemerintah orde baru. SPSI pada rezim itu hanya sebagai kaki tangan pemerintah agar bisa meredam gerakan pekerja yang menentang pemerintah. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) menjadi mandul dalam perjuangan gerakan pekerja apalagi dengan di keluarkannya UU Ketenagakerjaan No 25 Tahun 1997.

Meminjam penelitian Michel bahwa serikat pekerja kini terjebak pada oligarki yang pada akhirnya tidak lagi mewakili kepentingan para anggotanya bahkan ketika serikat pekerja bertambah besar menjadi birokrasi yang lebih kompleks, para anggotanya sulit untuk mengelola

---

<sup>7</sup> George Ritzer, Douglas J. Goodman, 2010, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Kencana, hal. 121

<sup>8</sup> Eugene V. Schneider, *Industrial Sociology* (diterjemahkan oleh J.L Ginting), Jakarta: Aksara Persada, hal. 410

<sup>9</sup> Indrasari Tjandraningsing, Rina Herawati, 2008, *Ringkasan Hasil Penelitian; Dinamika Jaringan Perburuhan Indonesia; Angin Segar Gerakan Buruh Indonesia*, Bandung: Akatiga, hal. 5

administrasi secara efisien alhasil kepentingan anggota diganti dengan kepentingan pribadi di tambah ketika serikat buruh masuk dalam lembah korporatisme.<sup>10</sup>

Pekerja pada waktu itu bukan tanpa perlawanan karena terlalu besar intervensi pemerintah, puncaknya pada periode 1998-2003 Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) mengalami perpecahan menjadi empat serikat buruh, kelompok SPSI itu sendiri, kelompok perpecahan SPSI, kelompok SPSI yang bergabung dengan LSM. Perpecahan serikat buruh ini tidak lepas dari perbedaan kepentingan yang melatarbelakangi, dari mulai serikat pekerja yang pro-pemerintah, pro-pengusaha sampai serikat pekerja yang benar-benar memperjuangkan kepentingan pekerja.

Sampai saat ini Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) masih bertahan, akan tetapi bayang-bayang sejarah Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) yang merupakan hasil dari bentukan rezim orde baru yang pro pemerintah dan pengusaha masih menggelayut, alhasil serikat pekerja ini mendapat banyak pertanyaan hingga saat ini, apakah sejarah masa lalu masih menjadi pola gerakan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI).

Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) khususnya Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT. LMB (Lestari Mahaputra Buana) menaungi 2200 pekerja ingin keluar dari stigma negatif yang melekat pada tubuh Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) karena pada dasarnya Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) merupakan organisasi pekerja yang merupakan wadah aspirasi dan perjuangan kepentingan pekerja untuk membela, melindungi dan memperjuangkan hak-hak para pekerja sehingga perwujudan kesejahteraan bagi para pekerja menjadi nyata. Dengan berlandaskan kerangka ideal tersebut maka Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT. LMB (Lestari Mahaputra Buana) membuat gerak nyata dalam perwujudan program-program

---

<sup>10</sup> Nicholas Abercombie, Sthepen Hill, Bryan S. Turner, 2010, *Kamus Sosiologi (diterjemahkan oleh Desi Noviani dkk dalam buku The Penguin Dictionary Of Sociology)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal.52

seperti pelatihan-pelatihan, koperasi pekerja, kesehatan akan tetapi di sisi lain tidak semua pekerja belum merasakan fungsi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dalam meningkatkan taraf kesejahteraan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik dengan masalah yang telah di ungkapkan di atas, dengan di tinjau dari berbagai aspek, khususnya sosiologi industri yang berkaitan dengan relasi pekerja serta peran organisasi dalam perwujudan kepentingan pekerja.



## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan hasil observasi baik formal maupun non formal, banyak di temukan masalah-masalah dalam SPSI dalam mewujudkan kesejahteraan para pekerja. Masalah-masalah tersebut diantaranya;

1. Terjadi kesenjangan antara anggota dengan yang lainnya
2. Pola perekrutan para pekerja yang masuk anggota Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
3. Tingkat partisipasi anggota terhadap organisasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
4. Masih belum terpenuhinya hak-hak para pekerja
5. Peran Serikat Pekerja Seluruh Indonesia terhadap Kesejahteraan para pekerja

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada peran Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), karena pada dasarnya Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) merupakan kelompok sekunder yang pembentukan atas dasar kepentingan tujuan para pekerja.

Peran Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), menjadi ganda ketika dia mewujudkan peran SPSI dalam mewujudkan kesejahteraan terhadap anggotanya serta ketika dia berhadapan dengan manajemen perusahaan. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), harus mampu berdikari dalam mewujudkan kesejahteraan dengan program-programnya dan harus mampu membuat kebijakan ketika mereka berhadapan dengan manajemen perusahaan.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dmasalah dan identifikasi masalah di atas, maka peneliti akan memfokuskan penelitian pada:

1. Bagaimana gerakan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT. Lestari Mahaputra Buana?
2. Bagaimana hubungan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT. Lestari Mahaputra Buana dengan Perusahaan untuk mewujudkan kesejahteraan para pekerja?
3. Bagaimana peran Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) secara mandiri mewujudkan kesejahteraan para pekerja?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berpijak dari rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui gerakan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT. Lestari Mahaputra Buana
2. Untuk mengetahui hubungan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT. Lestari Mahaputra Buana dengan Perusahaan untuk mewujudkan kesejahteraan para pekerja?

3. Untuk mengetahui peran Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) secara mandiri mewujudkan kesejahteraan para pekerja?

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun akademis. Ada beberapa hal yang dapat dipandang sebagai manfaat positif dengan mengangkat penelitian ini, diantaranya;

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang Sosiologi Industri, khususnya dalam bidang serikat pekerja di Indonesia yang dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Dengan demikian di harapkan akan memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi perkembangan pengetahuan ilmiah di bidang sosiologi
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah minat para peneliti untuk mengembangkan penelitian perkembangan serikat pekerja serta menjadi referensi dan manifesto serikat pekerja dalam proses perjuangan untuk mewujudkan kesejahteraan para pekerja.

### **1.6 Kerangka Pemikiran**

Berkelompok merupakan suatu ciri-ciri manusia yang bersifat manusiawi, ini tidak lepas dari manusia sebagai makhluk sosial yang tidak mampu hidup memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan dari orang lain. Manusia akan terus belajar dari berbagai pengalamannya, baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial karena pada dasarnya manusia harus mampu

menyesuaikan dirinya dengan lingkungan entah itu dengan alam sekitarnya maupun dengan individu atau masyarakat yang lain. Melalui pengalaman inilah khususnya pengalaman berkelompok manusia menghayati norma-norma, tujuan, cita-cita, perasaan yang pada pokok inilah menjadi pembeda antara kita dengan hewan.

Kelompok bagi Carles Horton Cooley dalam bukunya *Social Organitations* tahun 1909 di bagi menjadi dua, kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer merupakan kelompok yang anggotanya di dasarkan pada hubungan darah maupun emosional sehingga kelompok ini antar anggotanya sangat saling mengenal, akrab, personal. Kelompok ini secara organisatoris tidak bersifat struktural artinya relasi-relasi yang terjadi tidak bersifat kaku, bersifat informal alhasil hubungan yang dihasilkan bersifat erat dan pribadi sehingga setiap anggotanya melebur dengan anggota yang lain.<sup>11</sup>

Kedua, merupakan kelompok sekunder yang notabene terbentuk dari kesamaan pekerjaan, sehingga berorientasi pada keuntungan dan azas manfaat (utilitarian) belaka alhasil relasi-relasi yang terjadi dalam kelompok ini bersifat sementara, segmental dan impersonal.<sup>12</sup> Kelompok ini sangat birokratis artinya struktur yang terdapat dalam kelompok ini sangat ketat dan formal.

Bagi Antonio Gramsci pembagian kelompok sosial (Organisasi) di bagi menjadi dua, Negara (*State*) dan Masyarakat Sipil (*Civil Society*). Masyarakat sipil (*Civil Society*) merupakan wadah kelompok sosial dan perjuangan demokrasi kerakyatan, karena kelompok ini merupakan representasi dari kehendak rakyat dari bawah yang membangun hegemoninya melalui perjuangan-perjuangannya.<sup>13</sup> Seperti halnya serikat dagang, organisasi keagamaan, organisasi

---

<sup>11</sup> Paul B. Horton, *Op.Cit*, hal. 225

<sup>12</sup> *Ibid*, hal.226

<sup>13</sup> Roger Simon, 2000, *Gagasan Politik-Politik Gramsci* (diterjemahkan oleh Kamdani dan Imam Baehaqi dalam buku Gramsci's Political Thought), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 12



lingkungan maupun kemahasiswaan. Masyarakat sipil (*Civil Society*) harus mampu menghegemoni, entah pada kelompok lain maupun Negara agar mampu memperjuangkan kepentingannya.

Kelompok –pada nantinya akan di sebut organisasi– akan menjadi jelas dalam perwujudannya apabila dilengkapi dengan adanya tujuan, pembagian pekerjaan, pembagian kekuasaan dan segala macam hubungan yang mempunyai satu tanggung jawab. Tujuan atau fungsi sebuah organisasi merupakan sebuah landasan bagi gerak langkah sebuah organisasi, dan gerak langkah ini di derivasikan menjadi sebuah rencana ataupun program kerja yang kelak akan menjadi proyeksi tujuan yang di harapkan. Selain dari itu sebagai pendukung ada sistem norma, pembagian kerja, kewenangan dan kekuasaan serta komunikasi sehingga tujuan organisasi bisa tercapai.

Pada dasarnya pola gerakan pekerja bisa di identifikasikan ketika dari mana serikat pekerja itu terbentuk serta tujuan akhir dari gerakan pekerja. Proses ini sangat menentukan karena di titik ini menjadi awal berangkat proses ideologisasi yang di derivatifkan menjadi pola gerakan buruh.

Khususnya kaum Marxis, pola gerakan cenderung bermadzhab konflik lebih bersifat radikal, progresif, revolusioner karena pada dasarnya tujuan dari gerakan pekerja adalah menciptakan masyarakat tanpa kelas sehingga pola gerakan yang di hasilkan lebih konfrontatif. Persinggungan antara pekerja dengan manajemen menjadi sangat nyata karena pekerja menganggap manajemen (borjuasi) menindas dan mengeksploitasi kaum pekerja, alhasil aksi-aksi kekerasan, gerakan pengorganisasian, sabotase, *slow down*, pemogokan menjadi senjata bagi kaum buruh untuk melakukan perjuangannya.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Eugene V. Schneider, *Op, Cit*, hal. 332-346

Berbeda halnya dengan kaum Fungsionalisme yang lebih reformis dan mengutamakan keseimbangan. Bagi serikat buruh penganut madzhab Fungsionalisme pola gerakannya lebih mengutamakan jalan damai, artinya antara serikat buruh dengan manajemen menjalin kemitraan, adanya simbiosis mutualisme sehingga perjuangan buruh dilakukan dengan perjuangan parlementer—melalui regulasi—serta dengan perundingan kolektif dengan pihak manajemen. Walaupun demikian tidak jarang para buruh melakukan aksi turun ke jalan apabila perundingan tersebut tidak mencapai titik temu.<sup>15</sup>

Bagi kaum Fungsionalisme, khususnya parson organisasi di kelompokkan menjadi empat subsistem, Pertama Adaptasi (*Adaptation*), merupakan sebuah sistem yang harus menyesuaikan dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya, Pencapaian Tujuan (*Goal Attainment*), sebuah sistem harus mendefinisikan perannya dan mencapai tujuan utamanya, Integrasi (*Integration*) sebuah sistem harus mengatur hubungan antar bagian, sehingga selalu berjalan harmonis dan yang terakhir adalah Pemeliharaan Pola (*Latency*), sebuah sistem harus mampu memelihara, memperbaiki dan melengkapi sehingga sebuah kelompok akan terus terjaga.<sup>16</sup>

Keempat subsistem ini berkorelasi satu sama lain, artinya organisasi akan menjadi seimbang (*Equilibrium*) ketika keempat subsistem itu berjalan berdampingan. Khususnya Pemeliharaan Pola (*Latency*) menjadi sistem kepribadian sebuah organisasi. Pemeliharaan Pola (*Latency*) menjadi identitas bagi sebuah organisasi, karena pada dasarnya ide-ide, gagasan maupun ideologi berkumpul dalam sistem kepribadian<sup>17</sup>.

Secara garis besar argument fungsionalis di bagi menjadi tiga, pertama aktivitas sosial atau institusi dapat memiliki fungsi manifest maupun fungsi laten. Pembabakan ini merupakan

---

<sup>15</sup> *Ibid*, Hal 367-370

<sup>16</sup> George Ritzer, Douglas J. Goodman, 2010, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Kencana, hal. 121

<sup>17</sup> *Ibid*, Hal. 129-130

konsep dari Merton. Menurut Merton fungsi di definisikan sebagai konsekuensi-konsekuensi yang dapat di amati yang menimbulkan adaptasi atau penyesuain tertentu Fungsi manifest merupakan fungsi yang di harapkan, artinya fungsi ini menjadi tujuan utama dari sebuah organisasi, fungsi laten merupakan fungsi yang tersembunyi, fungsi yang tidak diharapkan, karena pada dasarnya tindakan-tindakan untuk mencapai fungsi manifest selalu ada hubungan kausalitas dengan fungsi laten. Selain dari itu, analisis Merton sering mencampurkan antara motif subjektif individu dengan fungsi organisasi.

Kedua, aktivitas sosial dapat memelihara stabilitas sistem sosial. Misalnya Durkheim berpendapat bahwa praktik keagamaan berperan bagi integrasi dan stabilitas masyarakat, artinya sebagai perekat sosial dari masyarakat yang notabene heterogen dan yang ketiga aktivitas sosial dapat berperan dalam pemenuhan kebutuhan sosial dasar atau prasyarat fungsional, artinya konsep ini mengacu pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi jika ingin bertahan sebagai sistem yang berfungsi. Fungsi ini sebagai penunjang bagi keberhasilan fungsi lainnya. Misalnya sistem stratifikasi sosial yang di pergunakan untuk menjamin pada pembagian pekerjaan atas dasar kemampuan, entah dirinya sebagai penguasa maupun sebagai orang yang di kuasai.

Dalam sudut pandang manusia sebagai makhluk biologi, manusia tunduk kepada hukum biologi diantaranya ialah bahwa untuk melangsungkan hidupnya, manusia harus menyesuaikan dirinya dengan lingkungan entah itu sebagai makhluk individu berhadapan dengan alam maupun dengan manusia. Dalam kaitaannya, manusia agar melangsungkan kehidupannya harus mampu memenuhi kebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan merupakan sesuatu hal yang mendasar bagi manusia, artinya menjadi fungsi dari kehidupan manusia. Menurut Maslow, kebutuhan dasar

manusia merupakan kebutuhan bawaan, tersusun dan bertingkat. Kebutuhan bertingkat ini disusun kedalam lima kebutuhan, yakni:<sup>18</sup>

1. Kebutuhan-kebutuhan dasar fisiologis
2. Kebutuhan rasa aman
3. Kebutuhan akan rasa cinta dan memiliki
4. Kebutuhan akan rasa harga diri
5. Kebutuhan akan aktualisasi diri

Menurut Maslow kebutuhan pada tingkat dasar merupakan kebutuhan yang paling mendesak dari pada kebutuhan di atasnya, artinya kebutuhan ini menjadi berjenjang satu sama lain. Berbeda dengan Mohammad Hatta fungsi sebuah organisasi haruslah memuat dan berisikan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian dan kemerdekaan. Konsep inilah yang oleh Hatta diderivasikan kepada konstitusi Negara kita UUD 45 Pasal 27 ayat 2 "...tiap-tiap warganegara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan..." serta pasal 33 "perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan kekeluargaan, cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Fadhli Nurdin, 1990, *Pengantar Studi Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Angkasa, hal.19

<sup>19</sup> Anwar Abbas, 2010, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, hal.xi-xxi